



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112
Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 e-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

Pangkalan Bun, 13 Agustus 2020

Kepada
Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
di. -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 900/ 1040/III/BPKAD/2020

TENTANG

**MEKANISME PENATAUSAHAAN PENYETORAN PAJAK PUSAT
YANG DISETORKAN KE REKENING KAS UMUM NEGARA (RKUN)**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (DOK), maka perlu ditegaskan kembali mekanisme pembayaran, format laporan, dan batas waktu penyampaian laporan penyeteran pajak pusat yang disetorkan ke RKUN sebagai berikut:

1. Seluruh pajak pusat yang disetorkan ke RKUN wajib dibayar melalui pemotongan pada saat menerbitkan SPP-SPM dengan disertai *billing* pajak.
2. Seluruh pembayaran pajak pusat yang disetorkan ke RKUN wajib direkap secara lengkap dan benar sebagaimana format pada lampiran surat edaran ini dan disampaikan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui email: ntpn.bpkadkobar@gmail.com
3. Batas waktu penyampaian rekap pembayaran pajak pusat yang disetorkan ke RKUN tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Dalam hal SKPD sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum menyampaikan rekap pembayaran pajak pusat yang disetorkan ke RKUN, maka penerbitan SPD dan SP2D tidak dapat diproses.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 September 2020.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Kepala BPKAD Kab. Kotawaringin Barat
selaku PPKD,

Drs. ROCHIM HIDAYAT
NIP. 19640818 199403 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
2. PT. Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun

KERTAS KERJA PAJAK
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 BULAN.....
 TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran Surat PPKD Kab. Kotawaringin Barat
 Nomor : 900/1040/III/BPKAD/2020
 Tanggal : 19 Agustus 2020

SKPD :.....
 KODE SKPD :.....

NO URUT	SPM		SP2D		KODE AKUN BELANJA	POTONGAN PAJAK			NPWP REKANAN/ BENDAHARA	NAMA REKANAN/ BENDAHARA	NTPN	NTB	POTONGAN PAJAK YANG SEHARUSNYA	URAIAN BELANJA	KET
	NOMOR	NILAI BELANJA (RP)	NOMOR	NILAI BELANJA (RP)		KODE AKUN/KODE JENIS PAJAK	JENIS PAJAK	JUMLAH (RP)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
dst.															
TOTAL	(D)	-	(E)	-	-	-	-	(F)	-	-	-	-	(G)	-	-

CONTOH

KERTAS KERJA PAJAK
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BULAN(B).....
TAHUN ANGGARAN 2020(C).....

Lampiran Surat PPKD Kab. Kotawaringin Barat
Nomor : 900/1044/II/SP/KAD/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020

SKPD
KODE
SKPD

NO URUT	SPM		SP2D				POTONGAN PAJAK				NTPN	NTB	POTONGAN PAJAK YANG BEHARUSNYA	URAIAN BELANJA	KET
	NOMOR	NILAI BELANJA (RP)	NOMOR	NILAI BELANJA (RP)	KODE AKUN BELANJA	KODE AKUN/ KODE KENIS PISAN PAJAK	JENIS PAJAK	JUMLAH (RP)	NPWP PEKERJA/ BENDAHARA	NAMA REKAMAH BENDAHARA					
1	0069/BL/SPM.LSPUR	23.529.000,00	0084/BL/SP2D.LS/2019	23.529.000,00	5.2.3.20.04	411126	PPH PASAL 4	856.600,00	CV WARRINGIN ENGINEERING CONSULTANT	988E4057C123F700	190319000438	655.600,00	Pembangunan Jembatan, Perbaikan Jalan, 20% dari Pekerjaan Perbaikan Jalan, Perbaikan Jalan, Perbaikan Jalan 2. Berdasarkan Surat Perjanjian (SP) No.6004/13-SP/604-2019/SPUR.16, 12 Februari 2019, Surat Perjanjian yang Men Di, Jemberdo Nomor Jember : SOB 2019 13.00 1 00001308, Tanggal 21 Februari 2019, Kepada SAD MAHAUDIN NOOR, ST Diraktor CV. WARRINGIN ENGINEERING CONSULTANT (DAU).	15	
2	0069/BL/SPM.LSPUR	23.529.000,00	0084/BL/SP2D.LS/2019	23.529.000,00	5.2.3.20.04	411211	PH	2.139.000,00	CV WARRINGIN ENGINEERING CONSULTANT	5168305751FJRD00	190319000438	2.139.000,00	Pembangunan Jembatan, Perbaikan Jalan, 20% dari Pekerjaan Perbaikan Jalan, Perbaikan Jalan, Perbaikan Jalan 2. Berdasarkan Surat Perjanjian (SP) No.6004/13-SP/604-2019/SPUR.16, 12 Februari 2019, Surat Perjanjian yang Men Di, Jemberdo Nomor Jember : SOB 2019 13.00 1 00001308, Tanggal 21 Februari 2019, Kepada SAD MAHAUDIN NOOR, ST Diraktor CV. WARRINGIN ENGINEERING CONSULTANT (DAU).	15	
3	1435/SPM.LS/SP2D/2019	900.000,00	07472/BL/SP2D.LS/2019	900.000,00	2.1.3.01.01	411121	PASAL 21	37.500,00	WIATYONO	89A5108JUF627JRAE	152552000225	37.500,00	Sosialisasi Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan Hutan dan Lahan di Kecamatan Kurus tanggal 4 Juli 2019	16	
4	1435/SPM.LS/SP2D/2019	900.000,00	07472/BL/SP2D.LS/2019	900.000,00	2.1.3.01.01	411121	PPH PASAL 21	12.500,00	PAHRUL LAJ S STP	EB59808JRH515R7	190304000030	12.500,00	Sosialisasi Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan Hutan dan Lahan di Kecamatan Kurus tanggal 4 Juli 2019	16	
5	1435/SPM.LS/SP2D/2019	900.000,00	07472/BL/SP2D.LS/2019	900.000,00	2.1.3.01.01	411121	PPH PASAL 21	60.000,00	MUHAMMAD RUSMANWARD, SH.MH	7A8B867F06K7NSL6	190304000032	60.000,00	Sosialisasi Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan Hutan dan Lahan di Kecamatan Kurus tanggal 4 Juli 2019	16	
TOTAL												(G)			

NO URAIAN ISIAN

- A Diisi dengan keterangan bulan kertas kerja pajak
- B Diisi dengan nama SKPD
- C Diisi dengan kode SKPD berdasarkan.
- D Diisi dengan Jumlah SPK.
- E Diisi dengan Jumlah SP2D
- F Diisi dengan Total Potongan Pajak
- G Diisi dengan Total Potongan Pajak yang seharusnya.
- 1 Diisi dengan nomor
- 2 Diisi dengan nomor SPN/SPD berdasarkan Lengkap. Contoh (041/SPM.LS/BL/SP/KAD/2020)
- 3 Diisi dengan nilai belanja (Nilai kotor) yang tercatat dalam SPN berdasarkan
- 4 Diisi dengan nomor SP2D berdasarkan Lengkap. Contoh (00571/BL/SP2D.LS/2020)
- 5 Diisi dengan nilai belanja (Nilai Kotor) yang tercatat dalam SP2D berdasarkan.
- 6 Diisi dengan kode akun belanja yang tercatat dalam SPN/SP2D tidak dipisah menggunakan titik(.) maupun (-) Contoh 5220303
- 7 Diisi dengan jenis potongan pajak yang tercatat dalam SPN / SP2D. Contoh (PPH PASAL 21).
- 8 Diisi dengan jenis potongan pajak yang tercatat dalam SPN / SP2D.
- 9 Diisi dengan nama rekanan/Bendahara Pengeluaran SKPD yang berjumlah 15 digit angka tidak dipisah menggunakan titik(.) maupun (-).
- 10 Diisi dengan NPWP rekanan/Bendahara Pengeluaran SKPD.
- 11 Diisi dengan nama rekanan/Bendahara Pengeluaran SKPD.
- 12 Diisi dengan NTPN (nomor transaksi Bank) berupa angka maupun huruf sebanyak (16 Digit), tidak dipisah menggunakan titik(.) maupun (-).
- 13 Diisi dengan NTPN (nomor transaksi Bank) berupa angka maupun huruf sebanyak (12 Digit), tidak dipisah menggunakan titik(.) maupun (-).
- 14 Diisi dengan nominal potongan pajak yang seharusnya
- 15 Diisi dengan uraian belanja lengkap
- 16 Diisi dengan keterangan yang diperlukan.

Catatan:

- 1 Kertas kerja pajak Mencakup semua jenis belanja termasuk gaji, biaya kesehatan, JKK, JOD dan belanja yang memiliki potongan pajak-pajak daerah
- 2 PPh 21 Gaji bulanan mohon untuk dimasukkan dalam Laporan Kertas Kerja Pajak. Meski tanpa NTPN.
- 3 Untuk SPM yang memiliki potongan (2 atau lebih) PPh, PPh dan Lain-lain, maka nomor SPN, SP2D, NPWP, NTPN, NTB dan keterangan lainnya diinput kembali untuk masing-masing potongan pajaknya
- 4 Untuk potongan Pph 21 maupun Pph 23 yang dikenakan untuk lebih dari satu penerima, maka masing-masing Pph 21 dan Pph 23 diinput nilainya sesuai dengan besaran potongan yang dikenakan kepada masing-masing penerima berikut juga dengan nomor SPN, SP2D, NPWP, NTPN, NTB dan Keterangan lainnya contoh pemegang lombo juara 1, 2, 3 yg billing pajaknya tidak di gabung
- 5 Apabila melakukan COPY & PASTE nomor SPN dan SP2D dan aplikasi simkad, mohon untuk menghilangkan HYPERLINK aplikasi simkad agar data yang di masukkan dalam Kertas kerja Pajak dapat dibaca dan bisa dijumlahkan
- 6 Untuk NTPN, NTB dan NPWP yang berawalan angka nol, mohon ditambahkan tanda titik (.) sebelum angka nol
- 7 Dalam hal Pembayaran pajak dua kali atau lebih agar mencantumkan masing-masing nomor dan nilai SPN, SP2D, kode Akun pajak, Nilai Pajak, kode NTPN dan NTB-nya.
- 8 Kewalid-an, kejelasan dan kelengkapan data yang di masukkan dalam Laporan: Kertas Kerja Pajak memudahkan kita bersama dalam penyusunan laporan-laporan di kemudian hari.